

PERAN AKTOR DALAM PROSES PEMBENTUKAN DINASTI POLITIK (STUDI KASUS DI KABUPATEN PURWAKARTA)

Dea Arsyad Mujtahid Shibghotulloh¹, Husin Al-Banjari², Yusa Djuyandi³

¹Pascasarjana Program Studi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
deaarsyadms@gmail.com

²Pascasarjana Program Studi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
husin_albanjari@yahoo.com

³Pascasarjana Program Studi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
f_yusa@yahoo.com

[Doi:10.23969/paradigmapolistaat.v3i1.2931](https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v3i1.2931)

Abstract

The political phenomenon at the local level which concentrates power limited to the family is interesting to highlight. The power which is only hegemony by the political actor by making his relatives as part of a political dynasty becomes a problem in democratization in Indonesia. Opportunities for the wider community were eroded because the tap to power was blocked by the local elite. The power tree formed by Dedi Mulyadi as a political actor, by making it easier for his wife Anne Ratna Mustika as Purwakarta regent to succeed Dedi Mulyadi, as well as his son Ahmad Habibi Bungsu Maula Akbar as chairman of DPD level II Golkar Party Purwakarta Regency, strengthen Dedi Mulyadi's position as a politician snapper class in the area. By using a qualitative research method approach and taking a case study of Purwakarta Regency, this research illustrates a political dynasty formed by political actors using political skills that are not visible to the public (hidden power). The results showed that the role of political actors based their political skills on knowledge, actors used political party instruments, bureaucracy, and also some Sundanese culture in shaping political dynasties. Moreover, the long-term interests of the actor who desires to become a leader at the level of West Java and National Provinces is an important finding in this article. This necessitates that the actor must be able to secure his power base in Purwakarta Regency.

Keywords: Political Dynasty, Political Actors, Hidden Power.

Abstrak

Fenomena politik di aras lokal yang memusatkan kekuasaan yang terbatas hanya pada keluarga menarik untuk disorot. Kekuasaan yang hanya di hegemoni oleh sang aktor politik dengan menjadikan sanak keluarganya sebagai bagian dari dinasti politik, menjadi permasalahan dalam demokratisasi di Indonesia. Peluang masyarakat luas menjadi tergerus karena keran menuju kekuasaan dihambat oleh elit lokal. Pohon kekuasaan yang dibentuk oleh Dedi Mulyadi sebagai aktor politik, dengan memudahkan langkah istrinya yaitu Anne Ratna Mustika sebagai bupati Purwakarta penerus Dedi Mulyadi, serta anaknya yaitu Ahmad Habibi Bungsu Maula Akbar sebagai ketua DPD tingkat II Partai Golkar Kabupaten Purwakarta, menguatkan posisi Dedi Mulyadi

sebagai politisi kelas kakap di daerah. Dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif dan mengambil studi kasus Kabupaten Purwakarta, penelitian ini menggambarkan dinasti politik dibentuk oleh aktor politik dengan menggunakan political skill yang tidak terlihat oleh khalayak (kekuasaan tersembunyi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aktor politik mendasarkan political skill nya pada knowledge, aktor menggunakan instrumen partai politik, birokrasi, dan juga sebagian budayawan Sunda dalam membentuk dinasti politik. Lebih dari itu, kepentingan jangka panjang sang aktor yang berhasrat menjadi pemimpin di tingkat Provinsi Jawa Barat dan Bahkan Nasional menjadi temuan penting dalam artikel ini. Hal tersebut meniscayakan sang aktor harus bisa mengamankan basis kekuasaannya di Kabupaten Purwakarta.

Kata kunci: *Dinasti Politik, Aktor Politik, Kekuasaan Tersembunyi.*

I. Pendahuluan

Menjamurnya dinasti politik di daerah merupakan salah satu imbas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Harapan dari otonomi daerah yang seharusnya memposisikan rakyat sebagai pihak yang diuntungkan, ternyata secara realitas dihadapkan dengan menguatnya arus kekuasaan sentralistik oligarki dan dinasti politik, bahkan sampai pada ranah partai politik yang dipraktikkan oleh aktor politik di daerah.

Halim mengatakan “dalam konteks daerah, oligarki politik terjadi dengan munculnya dinasti politik yang memunculkan “raja-raja kecil” di daerah. Sementara di partai politik, oligarki politik ditunjukkan dengan kuatnya arus sentralisasi kebijakan partai politik.” (Halim, 2014:164). Perluasan kekuasaan dengan menggunakan ikatan keluarga sebagai unsur yang dilibatkan adalah praktik yang secara jelas menutup ruang demokrasi bagi pihak lain di luar ikatan tali perdarahan.

Sebagaimana spirit dari demokrasi, sepatutnya rakyat mempunyai peluang yang lebih besar untuk berkontribusi dalam proses politik. Dalam artian sangat terbuka

ruang keikutsertaan bagi semua masyarakat untuk ikut bertarung memperebutkan jabatan-jabatan politik mulai dari tingkat lokal hingga nasional sesuai dengan landasan hukum positif. Kenyataannya, masyarakat masih terhalang oleh status atau hak-hak sosialnya sebagai akibat dari adanya fenomena *political dynasty*.

Pro kontra atas gejala di atas sesungguhnya muncul dikarenakan sudut pandang kepentingan seseorang dalam melihatnya. Dinasti politik dalam dunia politik modern menurut Bathoro dikenal sebagai “elit politik yang berbasiskan pertalian darah atau perkawinan sehingga sebagian pengamat politik menyebutnya sebagai oligarki politik.” (Bathoro, 2011: 117). Kelompok elit adalah kelompok yang mempunyai kapasitas untuk mempengaruhi proses hadirnya keputusan politik. “Sehingga mereka kadang relatif mudah menjangkau kekuasaan atau bertarung memperebutkan kekuasaan.” (Bathoro, 2011: 117).

Kekuasaan yang berada di tangan keluarga ini, hilirnya akan bertransformasi menjadi dinasti-dinasti politik di aras lokal yang sulit untuk dipensiunkan dalam kontestasi kepala

daerah. Dengan demikian bagi rahmat “kekuasaan yang telah mereka miliki akan menjadi abadi.” (Rahmat, 2015: 115). Sedangkan bagi Bathoro, bahwa jika ditelusuri “sebelum munculnya gejala dinasti politik, kelompok elit tersebut diasosiasikan elit partai politik, elit militer dan polisi, elit pengusaha atau pemodal, elit agama, elit preman atau mafia, elit artis, serta elit aktifis.” (Bathoro, 2011: 117).

Sadar atau tidak, dinasti politik terus membangun jejaring *power* nya dengan kokoh hingga mampu mengkooptasi dan membunuh demokrasi dalam partai politik. Martien Herna Susanti berujar bahwa “dalam konteks masyarakat juga terdapat upaya menjaga *status quo* di daerahnya dengan mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah menggantikan petahana.” (Susanti, 2017:111). Suksesor dari petahana itulah yang terus menerus dijaga demi mempertahankan kekuasaan.

Dari banyaknya fenomena dinasti politik di Indonesia, Kabupaten Purwakarta sebagai daerah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki dinamika politik yang cenderung mengarah pada pelanggaran kekuasaan oleh keluarga, sebagaimana juga *jamak* terjadi berbagai daerah di Indonesia. Kabupaten Purwakarta hadir dengan dinamikanya tersendiri. Sebagai gambaran umum, Kabupaten Purwakarta merupakan kabupaten terkecil dalam segi luas wilayah di Jawa Barat¹ yang memiliki 17 Kecamatan, dan baru dipimpin oleh dua Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat, tepatnya pada masa periode 2008-2013 dan 2013-2018, yang bernama Dedi

Mulyadi, serta pada tahun 2018 hingga sekarang dipimpin oleh Anne Ratna Mustika.

Kemunculan hegemoni kekuasaan di Kabupaten Purwakarta terlihat dari sosok Dedi Mulyadi sebagai Bupati Purwakarta² selama dua periode yaitu 2008-2013 dan 2013-2018. Dedi Mulyadi yang juga berposisi sebagai ketua DPD tingkat I Partai Golkar Provinsi Jawa Barat periode periode 2016-2020, pernah mencalonkan diri sebagai calon diri pada tahun 2018 untuk posisi wakil Gubernur Jawa Barat (walaupun kalah), Dedi Mulyadi secara bersamaan memberikan jalan kepada istrinya yang bernama Anne Ratna Mustika sebagai penerus dirinya sebagai calon bupati Purwakarta pada periode 2018-2023, kemudian Anne pun dinyatakan menang³ dalam pilkada tersebut. Munculnya Anne ini tidak serta merta menghentikan akrobat politik Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi kemudian menjadi anggota DPR RI terpilih pada pemilu 2019. Tak hanya cukup menjadikan istrinya sebagai bupati Purwakarta, partai Golkar sebagai partai penguasa di Purwakarta⁴ menjadi lahan caplok dengan “menempatkan” anak pertama Dedi Mulyadi yang bernama Ahmad Habibi Bungsu Maula Akbar

¹ Data PPID Purwakarta tahun 2017 luas wilayah Kabupaten Purwakarta 971.72 km².

² Sebelum menjadi Bupati, Dedi Mulyadi menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Purwakarta pada periode 1999-2004 dan menjadi Wakil Bupati Purwakarta pada periode 2003-2008.

³ Jauh sebelum Anne terpilih menjadi Bupati, pamannya yang bernama Bunyamin Dudih merupakan Bupati Purwakarta periode 1993-2003.

⁴ Dilihat dari perolehan suara partai Golkar pada pemilu legislatif 2019 tingkat Kabupaten Purwakarta mencapai 11 kursi (24%) dan menjadi partai yang terbanyak mendapatkan kursi diantara partai politik lain.

(selanjutnya disebut Maula), yang berusia 20 tahun pada tahun 2019 (ketika penelitian ini mulai dilakukan), sebagai Ketua DPD tingkat II Partai Golkar Purwakarta⁵.

Artikel ini mencoba untuk melihat fenomena dinasti politik yang dibentuk oleh Dedi Mulyadi sebagai aktor politik dalam bingkai kekuasaan yang tersembunyi di Kabupaten Purwakarta. Penempatan jabatan-jabatan strategis yang di monopoli oleh satu keluarga, tentu menumbuhkan rasa pesimistis dalam pembangunan demokrasi yang substansial di daerah. Bukan tidak mungkin kedepannya, jabatan dalam ruang eksekutif, legislatif, hingga partai politik pun bisa dikuasai dengan sepenuhnya. Benih-benih yang sudah ditanam, menjadi matang apabila dirawat dengan baik oleh sang penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya, dan mengarah pada dinasti politik di daerah yang lebih hegemoni.

II. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengambil studi kasus (*case study*) pada dinamika kekuasaan yang terjadi di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Ini dilakukan agar peneliti lebih leluasa dalam mengkaji dan menganalisis berbagai fenomena yang ditemui di lapangan secara komprehensif, sebagaimana yang dikemukakan oleh seorang ahli ilmu sosial yang sangat *concern* pada tradisi penelitian kualitatif menjelaskan bahwa “penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa susunan kata atau

kalimat tertulis, lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dalam bentuk sebuah narasi.” (Creswell, 2015:97).

Ada beberapa langkah dalam proses pengumpulan data, yakni dengan melakukan observasi, yang merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan dan pengumpulan informasi/keterangan mengenai kenyataan yang akan diteliti. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara yang merupakan pengambilan data utama dengan cara meminta keterangan secara langsung dengan informan yang telah dipilih. Kemudian pengumpulan data pustaka, metode ini berperan penting dalam menambah dan mendukung proses pengumpulan data. Data-data inilah turut mendukung proses penelitian hingga tahap akhir. Dan terakhir, dokumentasi, yaitu proses pengumpulan data dari catatan-catatan atau dokumen berwujud tulisan, rekaman *audio-visual* maupun hasil evaluasi kegiatan yang telah dijalankan oleh pihak-pihak terkait yang dapat menghimpun atau mendokumentasikan data tersebut sejauh masih memiliki relevansi dengan permasalahan yang hendak ditulis

Adapun informan yang ditentukan sebagai sumber informasi dalam pengumuman data adalah informan yang dianggap banyak mengetahui dengan pasti informasi terkait dinamika sosial politik yang ada di Kabupaten Purwakarta terutama terkait dengan fenomena praktik politik dinasti di Kabupaten Purwakarta. Informan tersebut antara lain; *Pertama*, keluarga Dedi Mulyadi, Anne, dan Maula. *Kedua*, mantan birokrat di Kabupaten Purwakarta. *Ketiga*, Sarif Hidayat ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Purwakarta periode 2016-2019 yang juga sekaligus ketua DPRD Kabupaten

⁵ Maula terpilih secara aklamasi sebagai ketua partai Golkar Purwakarta pada 13 Okt 2019. Sebelumnya, Maula menjabat sebagai sekretaris partai Golkar Purwakarta di tahun yang sama.

Purwakarta periode 2014-2019. *Keempat*, aktifis, akademisi atau pengamat sosial politik maupun para pegiat pemilu dan demokrasi, yang pandangannya bisa menjadi tambahan data informasi diantaranya Zaenal Abidin, Asep Gunawan, AB, dan Kaka Suminta. Dan *kelima*, Raden Deden Ipan Sulaeman sebagai salah satu budayawan Sunda.

Konsep Aktor Politik

Dalam mendefinisikan aktor politik, berbagai pendapat muncul, dan dalam dalam rangka itulah peneliti menganalisis berbagai pandangan yang di sadur dari para ahli. Perspektif aktor politik yang pertama peneliti kutip dari Colin Hay, seorang pakar ilmu politik dari Inggris, dia mengutarakannya sebagai berikut:

“Actors are conceptualised as conscious, reflexive and strategic. They are, broadly, intentional in the sense that they may act purposively in the attempt to realise their intentions and preferences. However, they may also act intuitively and/or out of habit. Nonetheless, even when acting routinely they are assumed to be able to render explicit their intentions and their motivations.”
(Colin Hay, 2001:6).

Makna dari konsep yang dikemukakan tentang aktor politik oleh Colin Hay tersebut, menyuguhkan sebuah pandangan bahwa aktor politik mempunyai konseptualisasi sebagai individu/kelompok yang secara sadar dengan posisi yang dimilikinya berupaya untuk mewujudkan keinginannya dengan dasar pilihan mereka. Preferensi aktor politik tentu di dasarkan dari kepentingan yang dimiliki sang aktor politik. Tapi kadang juga

dalam menggunakan strategi dan konsep, aktor politik bersikap secara intuisi atau kadang keluar dari kebiasaannya.

Aktor politik dalam mengoperasionalkan perannya, perlu memiliki *political skill* yang berbasis pada *knowledge*. Pengetahuan sebagai padanan kata yang cocok untuk *knowledge*, menurut Hay (2001) *knowledge* adalah elemen yang digunakan oleh aktor politik untuk mengidentifikasi diri sang aktor kepada *the others* (pihak di luar sang aktor). Elemen ini penting karena sebagai basis kekuatan sang aktor dalam membangun kekuasaannya, yaitu dalam hal ini politik dinasti yang dibangun di level dimana sang aktor politik berpijak.

Konsep Dinasti Politik

Adapun terkait dinasti politik, peneliti paparkan secara deskriptif pandangan-pandangan dari salah satu ahli yang termaktub dalam tulisannya mengenai dinasti politik. Sebagai permulaan, peneliti mengutip pendapat dari Abdurrahman “dinasti adalah kata yang berdefinisi otokrasi atas sensitivitas pencitraan moyang, kakek, nenek, ayah, ibu, saudara, maupun kerabatnya masih menjadi benteng pertahanan legitimasi *power*. Dinasti dalam politik menciptakan lingkaran kekuasaan atau strukturisasi yang mendudukan keluarga, anak, dan koleganya.” (Abdurrahman, 2015:108).

Peneliti membatasi lima kriteria praktik dinasti politik yang menjadi pijakan dalam artikel ini, yaitu: *Pertama*, tidak adanya jeda berkuasa dalam kontestasi politik (memiliki efek politik dari petahana). *Kedua*, adanya kapitalisasi status sebagai keluarga penguasa (memanfaatkan momentum untuk bisa masuk ke wilayah politik). *Ketiga*, nominasi pencalonan kepala

daerah dan jabatan politik lain tidak dilakukan dengan demokratis (orang yang dicalonkan tidak diuji kemampuan dan pengalamannya). *Kempat*, melanjutkan tradisi kekuasaan (melindungi dan menikmati sesuatu yang dimiliki sebelumnya oleh keluarganya). Dan *kelima*, adanya kolaborasi antara penguasa untuk menggabungkan kekuatan politisi.

Konsep Kekuasaan Tersembunyi

Kemudian terkait *hidden power* (kekuasaan yang tersembunyi), merupakan kekuatan yang digunakan untuk kepentingan pribadi. “Kekuasaan ini muncul dalam rangka untuk mempertahankan kekuasaan dan *privilege* dari kepentingan-kepentingan.” (Gaventa, 2009:11). *Hidden power* menjadi alat penguasa untuk mempertahankan *status quo*-nya. Dinasti politik menjadi salah satu contoh konkrit bisa langgengnya kekuasaan, baik di dalam struktur pemerintahan maupun di dalam partai politik, hal itu tak lepas dari praktik *hidden power*.

Jika menggunakan kaca mata penelitian ini untuk dinasti politik, apa yang disebut Gaventa (2009) dengan bentuk kekuasaan tersembunyi, yaitu sebuah kekuasaan yang hanya dikuasi oleh sekelompok elit politik tertentu. Akibatnya masyarakat luas tidak bisa mengendus ruang politik tersebut. Dinasti politik juga mencerminkan bentuk kekuasaan yang beroperasi dalam rangka mengendalikan masyarakat dan mempengaruhi pilihan dan dukungannya. Di dalam bentuk tersembunyi inilah berbagai kebijakan rahasia diciptakan. Seperti kader partai politik yang baik oleh publik tiba-tiba tersingkir tanpa diketahui siapa dan bagaimana yang menyingkirkan kader

tersebut. Dari poin kubus kekuasaan tersebut, adalah sangat tepat dalam melihat dinasti politik sebagai suatu perilaku aktor politik yang hadir dalam bentuk kekuasaan yang tersembunyi.

Untuk mengetahui perbandingan penelitian sebelumnya, di sini peneliti menyajikan 3 (tiga) penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema, yakni dinasti politik di daerah. Berikut peneliti paparkan penelitian terdahulu terkait dinasti politik yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. *Pertama*, Penelitian yang ditulis oleh Wasisto Raharjo Djati (2013) tentang kebangkitan *Jaringan Keluarga dalam Relasinya dengan Kekuasaan di Aras Lokal*. *Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Leo Agustino (2010) dengan judul *Dinasti Politik Pasca-Otonomi Orde Baru: Pengalaman Banten*, *Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Andi Faisal Bakti (2007) tentang *Kekuasaan Keluarga di Kabupaten Wajo*, Sulawesi Selatan.

Berbeda dengan penelitian yang ada sebelumnya, artikel ini memiliki perbedaan dari beberapa segi. Dalam teori yang digunakan, penelitian ini menggunakan teori aktor politik dari Colin Hay. Penekanan peranan aktor dalam membentuk dinasti menjadi sorotan utama dalam artikel ini. Kemudian, belum adanya penelitian tentang dinasti politik di Kabupaten Purwakarta menjadi pembeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Oleh karena itu peneliti mencoba untuk membahas fenomena yang terjadi di Kabupaten Purwakarta dalam kaca mata politik, yaitu memfokuskan perhatian pada persoalan individu (aktor politik) yang melanggengkan kekuasaan dengan melibatkan keluarganya. Sementara itu, kekuasaan merupakan

substansi pokok pembahasan dalam bidang ilmu politik. Peneliti berupaya untuk meneliti bagaimana peran aktor politik dalam hal membangun kekuasaan sentralistik di Kabupaten Purwakarta dan juga orang-orang yang terlibat dalam lingkaran kekuasaan dinasti.

III. Pembahasan

3. Struktur Pendukung Terbentuknya Dinasti Politik

Kedudukan struktur dan aktor secara teoritis memiliki perbedaan sudut pandang jika dilihat dari mana yang lebih prioritas diantara keduanya dalam menentukan tindakan. Pertanyaan klasik tentang apakah struktur yang mempengaruhi aktor secara mekanis, atukah aktor menentukan struktur, sering muncul dalam setiap kajian ilmu politik. Secara konsep, struktur “ditakdirkan” sebagai sebuah sistem yang difungsikan sebagai penentu dan pembatas gerak langkah dari aktor dan bersifat mekanistik. Adapun jika dalam kacamata aktor, justru berbanding terbalik dengan struktur, karena aktor merupakan penggagas serta pelaksana dari sebuah sistem yang ada pada struktur. Aktor terkadang bisa

berperilaku melampaui sebuah sistem yang terdapat dalam struktur. Walaupun memang dalam kenyataannya, perbedaan pandangan dalam melihat struktur dan aktor tidaklah setegas apa yang termaktub dalam teori.

Diskursus tentang struktur dan aktor sebagaimana paparan di atas, memiliki relevansinya pasca reformasi di Indonesia, yaitu dinamika politik di aras lokal yang mensyaratkan kehadiran aktor dikaitkan dengan struktur dalam pergulatan politik. Hal itu dikarenakan kekuatan-kekuatan politik yang dahulunya secara struktur terpusat di Jakarta sebagai ibu kota Negara, setelah reformasi menyebar ke semua daerah di Indonesia. Di dalamnya terdapat aktor politik yang memberikan peran begitu besar dalam perjalanan politik nasional di Indonesia, dan tak terkecuali yang terdapat di tingkat lokal.

Di tingkat lokal, relasi struktur dengan aktor dalam ranah kekuasaan juga terjadi di Kabupaten Purwakarta. Terdapat pelibatan struktur yang dikuasai oleh satu keluarga di Kabupaten Purwakarta, di ruang eksekutif dan juga di ranah partai politik yang bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Jabatan yang diisi oleh Aktor Dinasti Politik

Hubungan Keluarga	Nama	Jabatan Politik
Ayah	Dedi Mulyadi	1. Bupati Purwakarta periode 2008-2013 & 2013-2018 2. Ketua DPD Tingkat I Partai Golkar Jawa Barat 2016-2020 3. Anggota DPR-RI 2019-2024
Ibu	Anne Ratna Mustika	Bupati Purwakarta 2018-2023
Anak	AHB Maula Akbar	Ketua DPD Tingkat II Partai Golkar Purwakarta 2019-2024

Dalam konteks Kabupaten Purwakarta, sebagai salah satu struktur penting dalam demokrasi lokal, partai politik seyogyanya ikut ambil bagian

dalam reformasi politik di Indonesia. Sarif Hidayat sebagai ketua Partai Golkar Kabupaten Purwakarta periode 2016-2020 yang juga ketua DPRD

Kabupaten Purwakarta periode 2014-2019, mengatakan bahwa diusungnya Anne Ratna Mustika sebagai calon bupati Purwakarta pada pilkada 2018 merupakan salah satu cara mempertahankan kekuasaan Dedi Mulyadi pasca tidak lagi menjabat sebagai orang nomor satu di Kabupaten Purwakarta.

“Ketika semua orang berkuasa maka pengamanan elemen itu dimana-mana, karena tidak mungkin lahir istilah dinasti politik atau politik kerajaan kalau tanpa ada kepentingan.” (Wawancara dengan Sarif Hidayat pada 14 Januari 2020).

Hal tersebut merupakan pendapatnya mengenai Anne menjadi calon bupati ketika suaminya (Dedi Mulyadi) akan lengser. Dia menambahkan bahwa didorongnya Anne Ratna Mustika menjadi calon bupati Purwakarta ketika itu, yang diusung oleh Partai Golkar beserta partai lain adalah mutlak berbicara kepentingan. Namun, ketika dikaitkan dengan praktik politik yang mengarah ke arah dinasti, dia mengatakan bahwa itu bukanlah suatu hal yang perlu dipermasalahkan, karena semua orang berhak berpolitik.

“Politik dinasti sebetulnya tidak jadi masalah, yang jadi masalah itu ketika menjalankannya benar atau tidak.” (Wawancara dengan Sarif Hidayat pada 14 Januari 2020).

Mekanisme partai politik dalam menjaring calon bupati memang mutlak ada, serta bervariasi cara mengusung kandidat dalam Pilkada. Ketika itu, semua partai politik cukup intens melakukan komunikasi politik, guna

mencapai titik temu dalam mengusung kandidat bupati serta wakil bupati Purwakarta periode 2018-2023. Namun, melihat diborongnya suara dukungan partai politik oleh pasangan Anne-Aming, hal itu memunculkan berbagai *tafsiran*. Diantaranya: *Pertama*, merupakan objektifitas partai politik pengusung dalam melihat kandidat yang memiliki kans kemenangan (elektabilitas) lebih besar dibandingkan kandidat lain. Interpretasi *kedua* adalah mekanisme partai politik untuk menjaring calon bupati/wakil bupati seolah-olah hanya sekedar formalistik-simbolik belaka. Pandangan itu wajar muncul karena secara realitas, pasangan tersebut tidak secara lahir secara intens ditempa dari awal di partai politik. Apalagi diperkuat oleh pandangan dari Sarif Hidayat bahwa sebagian partai politik yang ada di Kabupaten Purwakarta berkiblat ke Dedi Mulyadi.

“Di partai lain juga terpengaruh, salah satu yang memberikan pembelajaran politik adalah Dedi Mulyadi.” (Wawancara dengan Sarif Hidayat pada 14 Januari 2020).

Maka tidak heran jika ada pandangan bahwa partai politik dinilai sebagai fasilitator atas kelanggengan kekuasaan politik. Walaupun *everybody has right to politic*, namun acapkali ada ketidaksamaan dalam akses seseorang menuju kontestasi politik. Hal yang paling mendasar terlihat pada modal kekuatan individu untuk berkompetisi berbeda-beda, salah satunya kekuatan dari partai politik.

Hal senada diungkapkan oleh Maula, ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Purwakarta periode 2019-2023 yang juga anak kandung dari Dedi Mulyadi, terkait ibunya yang menjadi

calon bupati dan terpilih menjadi bupati Purwakarta. Dia berdalih bahwa ketika tongkat kekuasaan dipegang oleh yang bukan bagian dari keluarga ayahnya (Dedi Mulyadi), maka akan terjadi sebuah kegagalan pembangunan yang berkelanjutan. Maula menginginkan perjuangan membangun Purwakarta selama dua periode kepemimpinan Dedi Mulyadi jangan sampai ternodai oleh pihak lain.

“Kalau ini (baca: jabatan bupati) sampai ke tangan yang berbeda ideologi dan pandangan dengan kang Dedi selama 10 tahun dengan segini besarnya, *lebar* (baca: sayang). *Geus meunang cape hese, der rubah. Bisa teu ngurusna* (baca: sudah dapat secara capek, terus berubah. Bisa tidak mengurusnya). Kalau yang meneruskannya masih di lingkungan kita otomatis masih terjaga siklusnya.” (Wawancara dengan Maula Akbar pada 22 Januari 2020).

Sebagai sosok pemuda Purwakarta yang dianggap fenomenal, dia melanjutkan bahwa secara konstitusional, politik yang berdasarkan tali darah keluarga diperbolehkan, apalagi ini memiliki spirit dalam menyangkut rakyat banyak. Hal itu berdasarkan pada hak setiap warga negara untuk berpolitik yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi kesepakatan dalam berpolitik.

“Kan tidak ada undang-undangnya untuk melarang itu (baca: dinasti). Ini berbicara urusan untuk melanjutkan kepentingan masyarakat Purwakarta, dan

itu yang utama.” (Wawancara dengan Maula Akbar pada 22 Januari 2020).

Pandangan di atas jelas mengedepankan peran personal dalam hal ini keturunan (*trah*) yang diklaim paling berhak dan pantas untuk mengisi jabatan politik. Sebagaimana menurut Abdul Aziz “*trah* menjadi barang jualan sebagai yang paling memiliki kemampuan memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan. Mereka merasa bahwa keluarganya seolah-olah mendapat titah Tuhan untuk memimpin dan berkuasa.” (Aziz, 2019:190).

Partai politik dewasa ini sudah pantas dikatakan dikendalikan oleh segelintir aktor yang memiliki pengaruh dan kuasa yang besar dalam mengendalikan kebijakan partai. Buah dari kekuasaan yang di monopoli, salah satunya adalah melanggengkan kekuasaan elit yang tidak mau direnggut oleh pihak lain. Partai memberikan *privilege* tertentu bagi sang elit dan juga keluarga elit dalam setiap menghadapi kontestasi politik.

Peneliti meminta perspektif dari Kaka Suminta, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) pusat, mengenai fenomena aktor politik yang bagi dia berkarakter feodal dan bahkan seolah-olah didukung oleh struktur partai politik di Kabupaten Purwakarta karena tidak melakukan perimbangan kekuasaan dalam arti oposisi yang sebagaimana mestinya hadir.

“Pertama sangat feodal, terus yang kedua tidak ada oposisi. Permasalahannya adalah politik yang feodal tersebut tidak dibarengi dengan hadirnya oposisi yang benar. Jadi tidak ada

perimbangan kekuasaan. Memang kadang-kadang ada semacam perdebatan politik, tapi ujungnya seperti langsung pada *bargaining* kepentingan transaksional, siapa mendapatkan apa siapa menjadi apa gitu kan.” (Wawancara dengan Kaka Suminta pada 22 Mei 2020).

Hal itu lanjut dia, mengakibatkan ketidaksamaan akses politik bagi masyarakat secara luas dalam usaha mendapatkan kekuasaan. Keran yang ditutup menjadi hal yang jelas terjadi dalam rangka mempertahankan status *quo*. fenomena tersebut jelas terjadi dalam panggung kekuasaan yang terjadi di Kabupaten Purwakarta.

Maka pantas jika Dedi Mulyadi lebih mudah dalam melanggengkan kekuasaan dengan cara salah satunya dibantu dengan menggunakan sebagian birokrat. Sebagaimana ungkapan di bawah ini dari salah seorang mantan birokrat papan atas Kabupaten Purwakarta, ketika diminta pandangannya terkait politik dan birokrasi di Purwakarta, namun dia tidak ingin disebutkan namanya.

“Kepala daerah itu bisa menempatkan orang-orang walau menurut aturan Aparatur Sipil Negara (ASN) itu belum waktunya, dengan adanya kekuasaan kepala daerah bisa mengangkat seseorang menjadi pejabat, akhirnya sistem kepangkatan diabaikan, inilah yang akhirnya bisa memuluskan bukan saja pengelolaan daerah tetapi ya akhirnya pengelolaan pemerintah bisa

dimainkan.” (Wawancara dengan DN (bukan nama sebenarnya) pada 12 Oktober 2019).

Selain partai politik dan birokrasi, budayawan Sunda juga menjadi salah satu struktur kekuatan politik Dedi Mulyadi. Bagi Raden Deden Ipan Sulaeman, seorang budayawan Sunda, yang juga Pupuhu Padepokan Tutugan Gunung Burangrang Kabupaten Purwakarta, keturunan Dalem Arya Wanayasa ke 7. Berpendapat bahwa Dedi Mulyadi merupakan sosok yang menggunakan unsur kesundaan dalam berpolitik.

“Dedi Mulyadi sebagai seorang Sunda *nu mikaresep Sunda* (baca: yang menyukai Sunda), yang menggunakan Sunda sebagai lahan politiknya, dan menggunakan politiknya untuk memainkan Sunda. Meskipun sebenarnya jadi bupati *heula kakarak susundaan* (baca: dulu baru sunda-sundaan) kan begitu. Kesundaan dijadikan alat dagang untuk menarik simpatisan dan itu sangat memungkinkan. Budayawan Sunda pun ada yang dijadikan alat. Apakah tanggapan *urang Sundana sorangan* (baca: orang Sundanya sendiri) termasuk khususnya budayawan Sunda terkait Sunda yang dijadikan alat politik itu salah? Tidak melulu salah, *da wenang sunda mah arek dipake nanaon* (baca: ya bisa Sunda mau digunakan apa saja). (Wawancara

dengan Raden Ipan Sulaeman pada 13 Juni 2020).

Akan tetapi Raden Deden menekankan, itu bukan merupakan usaha untuk memperjuangkan Sunda. Karena ada hal yang melenceng yang imbasnya tidak memperjuangkan Sunda secara substansial dalam kerangka dan praktik kebijakan yang dikeluarkan oleh Dedi Mulyadi selama menjadi bupati dan ketika lengser. Justru baginya kekuasaan yang dibentuk oleh Dedi Mulyadi itu hanya eksklusif kepentingan pribadinya saja.

“Lain merjuangkeun Sunda, tapi merjuangkeun dinasti politik (baca: bukan memperjuangkan Sunda, tapi memperjuangkan dinasti politik), itu bagian dari konsep politik dia, tidak konsepsi Sunda. kalau dia memang benar-benar ingin membangun Sunda kenapa kudu turun tangan manehna nyieun Tajug Gede⁶ (baca: harus turun tangan dia membuat Tajug Gede), berikan saja ke istrinya sebagai bupati. Tong pipilueun ngurus Purwakarta deui atuh (baca: jangan ikut-ikutan mengurus Purwakarta lagi dong).” (Wawancara dengan Raden Ipan Sulaeman pada 13 Juni 2020).

⁶ *Tajug Gede* merupakan istilah yang digunakan pada sebuah bangunan Masjid dengan fasilitas taman yang terletak di Kabupaten Purwakarta. Diperuntukkan untuk pusat kegiatan keislaman dan kebudayaan Sunda. Sebagian orang menyebutnya *Islamic Centre*.

Adapun indikasi kedua praktik dinasti politik adalah ketika Maula sebagai anak kandung Dedi Mulyadi terpilih sebagai ketua Partai Golkar Kabupaten Purwakarta pascapemilu 2019, tepatnya bulan oktober 2019. Maula terpilih dengan suara penuh (aklamasi) dari semua unsur yang memiliki hak suara ketika Musyarawah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Purwakarta. Maula sendiri sebelum diadakan musda berposisi sebagai sekretaris, menggantikan Lalam Martakusumah yang mengundurkan diri beberapa waktu sebelumnya.

Ketika ditanya soal bagaimana pandangannya mengenai Maula (anak Dedi Mulyadi) menjadi ketua Partai Golkar Kabupaten Purwakarta, Sarif berpendapat bahwa itu adalah hal yang lumrah ketika politisi ingin tetap mempertahankan kekuasaannya dengan menggunakan cara yang dianggap baik dan menguntungkan bagi dirinya. Dia berujar ini ada korelasinya dengan pemerintahan daerah yang dijabat oleh ibunya Maula.

“Jelas bukan tanpa pertimbangan yang matang Dedi Mulyadi menjadikan anaknya (Maula) sebagai ketua Golkar Purwakarta, itu merupakan salah satu cara melanggengkan kekuasaan ke depan, di partai maupun di pemerintahan.” (Wawancara dengan Sarif Hidayat pada 14 Januari 2020).

Dengan usia yang relatif masih muda yaitu 20 tahun (ketika terpilih), Maula dengan penuh percaya diri memimpin Partai Golkar Kabupaten Purwakarta. Jabatan Maula sebagai ketua yang sebelumnya didapuk oleh Sarif Hidayat ini, menjadi banyak sorotan dari

khalayak. Menjadi sorotan karena posisi ketua partai penguasa memerlukan pengalaman yang mumpuni, tidak boleh sembarang orang menjabatkannya. Kemudian, proses jalannya musda berlangsung begitu cepat, bahkan pelaksanaan musda harusnya dilaksanakan pada tahun 2020 malah dihelat pada tahun 2019.

Menurut Sarif Hidayat, sebenarnya Musda yang dilaksanakan pada akhir tahun 2019 tersebut, merupakan hasil dari proses lebih dari satu tahun untuk memberhentikan dirinya lewat jalur konstitusional (secara AD/ART) Partai Golkar. Jauh sebelum Lalam Martakusuma mengundurkan diri dari sekretaris Partai Golkar Kabupaten Purwakarta, dia sudah merasakan gejala untuk mengganti dirinya sebagai ketua.

“Sebelum Lalam mengatakan bahwa saya akan diganti, saya sudah mengetahui bahwa ada rencana supaya saya mundur dari ketua Partai Golkar Kabupaten Purwakarta sudah dari 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu.” (Wawancara dengan Sarif Hidayat pada 14 Januari 2020).

Kemudian, Sarif berpandangan dengan penuh keyakinan bahwa dijadikannya Maula sebagai ketua Partai Golkar Kabupaten Purwakarta, adalah salah satu cara pengamanan untuk ibunya (Anne) yang sedang menjabat Bupati agar tetap berkuasa hingga 10 tahun ke depan. Maula sendiri, dalam pandangan Sarif akan dicalonkan terlebih dahulu sebagai anggota DPRD Kabupaten Purwakarta pada pemilu selanjutnya.

“Maula diproyeksikan untuk ditempatkan sebagai anggota legislatif dulu, Dedi Mulyadi menyimpan anaknya jadi ketua itu untuk pengamanan istrinya pemilihan yang kedua kalinya..” (Wawancara dengan Sarif Hidayat pada 14 Januari 2020).

Saat dikonfirmasi kepada Maula terkait gerak langkahnya di Partai Golkar Kabupaten Purwakarta, Maula berkata memang sejak awal terjun ke dunia politik didasarkan pada hasrat pribadinya yang ingin berkontribusi bagi masyarakat. Dan hal tersebut didukung oleh sang ayah yang juga sebagai pembimbing utamanya. Jabatan pertama yang dia emban adalah sebagai sekretaris Barisan Muda Kosgoro Provinsi Jawa Barat yaitu organisasi sayap Partai Golkar tingkat Provinsi.

“Di partai politik, untuk pertama kalinya saya bergabung dengan sayap partai yaitu BM Kosgoro, sebagai sekretaris tingkat Jawa Barat. Hal itu dilakukan agar bisa membantu masyarakat luas, dan saya harus masuk lewat jalur politik. Terlebih turunan ya, genetik itu lebih kuat.” (Wawancara dengan Maula Akbar pada 22 Januari 2020).

Akselerasi politik Maula di partai beringin tersebut begitu cepat dalam kurun waktu yang relatif singkat. Semenjak dipercaya menjadi sekretaris organisasi sayap partai Golkar Jawa Barat, Maula kemudian menjabat sebagai sekretaris Partai Golkar Kabupaten Purwakarta pada pertengahan tahun 2019. Dia

menggantikan posisi politisi senior yaitu Lalam Martakusuma yang mengundurkan diri sebelumnya. Dia mengatakan bahwa posisinya sebagai sekretaris Golkar Kabupaten Purwakarta merupakan atas pertimbangan dirinya dengan Dedi Mulyadi sebagai ayahnya.

“Saya melakukan konsultasi terlebih dahulu ke kang Dedi ketika akan menjadi sekretaris Partai Golkar Purwakarta.” (Wawancara dengan Maula Akbar pada 22 Januari 2020).

Beberapa bulan kemudian, posisi ketua Partai Golkar Kabupaten Purwakarta pun dipegang oleh Maula, melalui Musda Partai Golkar Kabupaten Purwakarta. Maula terpilih secara aklamasi alias seluruh Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar bulat mendukung Maula sebagai ketua pengganti Sarif Hidayat, yang juga mengundurkan diri sebelum dihelatnya musda.

Posisi nomor satu di partai Golkar Purwakarta tersebut, cukup menyedot perhatian banyak pihak, setidaknya karena dua hal, *pertama*: seorang anak muda ternyata mampu menggeser politisi senior yang sebelumnya sudah lama berkecimpung di partai. *Kedua*: hal tersebut menimbulkan makna tentang adanya agenda besar di balik menjabatnya Maula sebagai ketua partai besar dan berkuasa di Kabupaten Purwakarta.

Berbeda dengan pandangan dari Partai Golkar Purwakarta, Zaenal Abidin melihat ini menjadi kejadian yang diluar dugaan. Dia berpandangan, dengan dijadikannya Maula sebagai orang nomor satu di Partai Golkar Kabupaten Purwakarta, menjadi pertanda Dedi Mulyadi menginginkan

anak pertamanya itu sebagai bupati setelah Anne. Hal itu dia dasarkan pada jenjang usia serta pengalaman selama beberapa tahun kedepan, sudah cukup bagi Maula untuk dicalonkan sebagai Bupati Purwakarta periode selanjutnya.

“Maula calon bupati 2024, Anne itu adalah kader antara mengisi kekuasaan sampai putera mahkota siap, Anne itu kader biologis dan ideologis namun yang bersifat *temporary*, jadi kader antara untuk mengisi kekosongan pemenuhan kuota umur anaknya. Anaknya hari ini sudah ditempelkan di DPD Golkar sebagai ketua itu sebagai persiapan untuk mengisi jabatan utama yaitu untuk bupati purwakarta 2024. Dia calon bupati. Anne hanya satu periode.” (Wawancara dengan Zaenal Abidin pada oktober 2019).

Merebaknya pembicaraan dari sebagian elemen masyarakat terkait posisi ketua Partai Golkar Kabupaten Purwakarta yang di duduki oleh anak Dedi Mulyadi, membuat Asep Gunawan angkat bicara. Asep yang juga sebagai Doktor Komunikasi Politik lulusan Universitas Padjadjaran ini, memandang hal tersebut ada hubungannya dengan sosok Anne sebagai bupati Purwakarta yang dianggap kurang mumpuni. Karena keterbatasan kemampuan itulah, yang menurut Asep membuat Maula disimpan sebagai pemegang struktural tertinggi di partai Beringin Purwakarta tersebut, sebelum nanti diusung oleh Dedi Mulyadi sebagai orang nomor satu di Kabupaten Purwakarta pada pilkada selanjutnya.

“Karena Anne punya keterbatasan kompetensi dan melihat itu, sekarang dia (baca: Dedi Mulyadi) tampilkan anaknya (baca: Maula). Dan target tertingginya itu adalah jabatan bupati. Itu bagian dari rekayasa politik masa depan untuk melanggengkan politik dinasti.” (Wawancara dengan Asep Gunawan pada 18 April 2020).

Tentu, menjatukannya Anne sebagai Bupati dan Maula sebagai Ketua Golkar Purwakarta, tidak terjadi di ruang hampa yang tanpa sebab akibat, hal itu jelas memerlukan bangunan dan formulasi politik yang ampuh. Kekuatan politik yang besar mutlak hadir dalam terjadinya pengisian jabatan-jabatan strategis tersebut. Aktor politik berperan penting dalam jalannya konstelasi politik di Kabupaten Purwakarta. Bukan hanya di aras lokal, kekuasaan itu perlu di hadirkan di tingkat yang lebih tinggi. Dengan begitu, bisa dikatakan Anne dan Maula beserta Dedi menjadi “trisula” politisi yang mempunyai *power* di atas rata-rata politisi lain di Kabupaten Purwakarta.

Instrumen kekuatan yang digunakan oleh aktor politik di atas menggambarkan bahwa struktur partai politik, birokrat, hingga budayawan Sunda mampu dikondisikan dengan cukup sempurna sehingga bisa membentuk sebuah dinasti politik yang menguasai pemerintahan dan partai politik. Keragaman struktur yang bisa diselaraskan oleh kepentingan kekuasaan keluarga tersebut membuktikan bahwa ada peran yang begitu signifikan dari sang aktor politik.

3.2. Peran Aktor Dalam Membentuk Dinasti Politik

Dalam pembahasan sebelumnya, dijelaskan bahwa struktur digunakan dalam upaya membangun dinasti politik di Kabupaten Purwakarta. Berbagai spektrum kekuatan digalang demi meraih sebuah kekuasaan politik. Terkhusus untuk partai politik, dominasi yang berlaku di Kabupaten Purwakarta dibuktikan dengan jabatan eksekutif tertinggi dan juga partai politik itu sendiri diisi oleh satu keluarga.

“Partai politik merupakan pintu masuk dinasti politik untuk memperoleh jabatan politik. Hal itu terjadi karena belum adanya batasan keterlibatan politik kekerabatan dalam rekrutmen kandidat politik, menyebabkan terjadinya politik dominasi (keluarga politik) pada pengisian jabatan politik melalui kontestasi Pilkada.” (Muksin, 2019:136).

Bisa kita amati, bagaimana proses penjaringan yang dilakukan oleh partai politik cenderung tidak dilaksanakan secara baik. Penjaringan tidak mengarah pada kapabilitas serta visi ke depan seorang bakal calon dan juga tidak transparannya mekanisme penjaringan dan penentuan seorang menjadi kandidat dalam kontestasi dalam arena politik di aras lokal tersebut. Hal ini tidak semata-mata memberikan pandangan yang sepenuhnya buruk untuk perkembangan partai politik dan elit lokal, namun lebih pada realitas yang terjadi mengenai partai politik tersebut harus dibenahi dengan upaya yang maksimal. Bukan hanya partai politik yang dijadikan alat

melanggengkan kekuasaan, terdapat dimensi lain yang menjadi bagian intervensi aktor, seperti: padepokan kesundaan dan juga birokrasi.

Dengan pijakan kerangka bahwa aktor adalah sosok yang memiliki kesadaran diri sebagai pemimpin, kemudian aktor tersebut merefleksikan dirinya untuk berusaha mengadaptasikan keseluruhan hidupnya itu semakin mirip dengan audiensnya (masyarakat) dengan basis *knowledge*, hingga selanjutnya sang aktor menyusun strategi dalam memperkuat kekuasaannya melalui dinasti politik. Dalam meneliti wawasan cakrawala dinamika politik di Purwakarta khususnya soal peranan aktor dalam membentuk dinasti politik, peneliti menuangkan apa yang diutarakan oleh aktor politik yang memiliki kekuatan politik besar di Kabupaten Purwakarta.

Peneliti mengawali terlebih dahulu pandangan dari Sarif Hidayat tentang Dedi Mulyadi sebagai aktor politik yang dianggap berperan penting dalam membentuk keluarganya untuk berpolitik praktis, yang di dalam pembahasan sebelumnya, Sarif mengutarakan pandangannya tentang Anne dan Maula.

Sarif dengan latar belakangnya dahulu sebagai ketua Partai Golkar Kabupaten Purwakarta periode 2016-2019, begitu yakin bahwa perilaku politik Dedi Mulyadi tidak bisa dilepaskan dari sisi pribadi Dedi Mulyadi yang selalu “menghalalkan” segala hal demi kepentingan politiknya semata. Dia membeberkan dalam berbagai momentum, Dedi Mulyadi mencoba membuat citra dirinya sebaik mungkin di mata khalayak. Mulai dari yang bersifat kultural hingga yang berbentuk fisik. Dedi Mulyadi sendiri memang dikenal sebagai bupati yang

kala itu memiliki ketertarikan terhadap budaya Sunda, sebagai bagian dari salah satu strategi dan refleksi Dedi Mulyadi dalam membangun kekuasaannya.

“Semua persoalan dijadikan tangga, mau urusan *Susundaan*, mau urusan membuat jalan, mau urusan membuat masjid, mau urusan memperindah sekolah, semua itu dijadikan tangga menuju kekuasaan, kalau sudah tercapai akan ditinggalkan oleh Dedi Mulyadi.” (Wawancara dengan Sarif Hidayat pada 14 Januari 2020).

Namun, kembali Sarif mengatakan bahwa apapun gerakan politik yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi, adalah sebuah hal yang lumrah, termasuk ketika Dedi Mulyadi membangun singgasana dinasti politik di Kabupaten Purwakarta. Sarif sedari awal berkeyakinan tentang dinasti politik yang dibangun oleh Dedi Mulyadi itu merupakan aktualisasi dari perilaku politik Dedi Mulyadi yang tidak dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi, di satu sisi dia seolah-olah membiarkan akan adanya dinasti politik, yang memiliki imbas dipotongnya unsur lain di luar keluarga Dedi Mulyadi untuk berkuasa, namun di sisi yang lain dia pun berharap kepada masyarakat Kabupaten Purwakarta untuk jeli terhadap realitas politik yang ada di Kabupaten Purwakarta.

“Itu adalah ilmu politiknya Dedi Mulyadi, cuma dalam dunia politik saya sering menegaskan ke orang-orang, bahwa Dedi Mulyadi seperti itu tidak bisa disalahkan, sebab apa?”

dikarenakan itu adalah jurus politik, manusia berhak bermain politik mau seperti apapun juga. Namun, ke depannya saya berharap masyarakat Purwakarta harus melekat politik, *telek telik tenget*. *Telek* itu kita melihat, *telik* itu teliti, *tenget* itu kuat ingatan.” (Wawancara dengan Sarif Hidayat pada 14 Januari 2020).

Berbeda dengan Sarif, pandangan dari Maula sendiri menegaskan bahwa terpilihnya dia sebagai ketua Partai Golkar Kabupaten Purwakarta merupakan murni berkat tekad dan kerja kerasnya secara pribadi. Ketika dihubungkan dengan peran Dedi Mulyadi, dia berujar bahwa walaupun ada peran ayahnya, namun kadarnya tidak sampai masuk pada ranah untuk menekan dalam arti menjadikan dirinya secara mutlak harus menjadi ketua Golkar Purwakarta.

“Didorong pasti, tapi bagaimana tekad saya, kalau peran itu jelas, karena secara genetik, itu (baca: Dedi Mulyadi) mentor saya yang punya peran besar mendidik tapi bukan menjadikan, dengan memberikan pengetahuan tentang ilmu politik secara realistis. Beliau memberikan skema-skemanya dan taktiknya mengenai bagaimana konstelasinya dan permainannya seperti apa.” (Wawancara dengan Maula Akbar pada 22 Januari 2020).

Keterlibatan peran Dedi Mulyadi sulit untuk terbantahkan dalam bercokolnya

Maula sebagai ketua Partai Golkar Kabupaten Purwakarta. Melihat kuatnya sosok Dedi Mulyadi, Asep Gunawan berpandangan bahwa Dedi Mulyadi sudah mapan untuk dikatakan sebagai peselancar handal dalam mengarungi dunia perpolitikan di Kabupaten Purwakarta bahkan nasional. Gagasan yang sering muncul dari benak dirinya sendiri, selalu dijadikan kerangka dalam arah gerakan politiknya selama ini. Dalam hal berbicara mengenai hubungannya dengan Maula yang menjadi ketua partai berkuasa di Kabupaten Purwakarta, dan juga merambah hingga budaya kesundaan yang dijadikan identitas politik dirinya.

“Dedi adalah politikus jadi.

Dari secara stratak (baca: strategi taktik) dia sudah mumpuni. Dia sudah sempurna menjadi politisi, serta yang saya tahu selama saya berdiskusi dengan beliau, dia itu kan politisi yang sangat soloran, ide-ide yang muncul darinya dia coba untuk diwujudkan dan sampai hari ini berhasil.” (Wawancara dengan Asep Gunawan pada 18 April 2020).

Dikarenakan Dedi Mulyadi adalah sosok yang identik dengan kebudayaan Sunda, maka tidak heran Dedi hampir dalam segala kebijakannya bernuansa kesundaan ketika menjabat sebagai bupati Purwakarta. Kebudayaan sunda yang menjadi identitas politik Dedi Mulyadi, memang seolah-olah dijadikan ajang pembuktian diri bahwa kebudayaan Sunda bisa diejawantahkan melalui kebijakan yang menyangkut masyarakat.

Peneliti selanjutnya mencoba mengambil informasi terkait kiprah

politik Dedi Mulyadi dalam sudut pandang institusi padepokan kesundaan yang terletak di Kabupaten Purwakarta. Kebudayaan yang dijadikan identitas politik oleh sang aktor meniscayakan adanya kekhasan yang melekat pada dirinya. Unsur padepokan Sunda dianggap penting untuk digali informasinya terkait pandangan mereka dalam melihat sosok Dedi Mulyadi yang menggunakan kerangka kebudayaan Sunda dalam memimpin.

Dengan menggunakan “atribut” kesundaan sebagai salah satu cara dalam meraih kekuasaan dan memimpin. Dia berperan dalam suksesi jadinya sang istri sebagai bupati Purwakarta serta anaknya menjadi ketua partai Golkar Kabupaten Purwakarta yang berpotensi ke depan akan berkuasa di pucuk pemerintahan Purwakarta kelak. Hal itu berdasarkan pada kerangka berpikir Dedi Mulyadi pada kerajaan Sunda yang menurunkan kekuasaannya kepada keluarganya. Sebagaimana yang diutarakan oleh Raden Deden:

“Kita tahu bahwa Sunda itu selalu diturunkan secara turun temurun ke garis darah keluarganya, sampai ke tokoh-tokoh ulama dan para *auliya*⁷ (baca: pemimpin) dan Wali di Jawa Barat itu sudah pasti turunan raja-raja Sunda seperti Sunan Gunung Djati. Ketika seorang Dedi

Mulyadi mengusung kesundaan di Purwakarta secara otomatis di dalam paradigma persoalan pemerintahannya akan mengusung titik ke situ, jadi tidak heran kalau hari ini Dedi Mulyadi kemudian digantikan oleh istrinya esok lusa mungkin saja digantikan oleh anaknya, yang pasti *link* nya tidak keluar dari beliau.” (Wawancara dengan Raden Ipan Sulaeman pada 13 Juni 2020).

Lebih eksplisit lagi, Raden Deden mengkonfirmasi bahwa proses pembentukan dinasti politik sudah nyata terjadi. Sosok Dedi Mulyadi mempunyai keinginan untuk menjadikan dirinya dan sistemnya menjadi sistem Sunda yang dalam benak dia (walaupun layak diperdebatkan), dengan berlindung atas nama pelestarian kepemimpinan Sunda. Terlebih, dinasti politik yang dibentuk oleh Dedi Mulyadi tidak diharapkan terjadi sebenarnya bagi Raden Deden.

“Dinasti politik itu menjadi kakinya. Namun, dinasti politik yang dibangun oleh Dedi Mulyadi sangat tidak harus terjadi di Purwakarta.” (Wawancara dengan Raden Deden Ipan Sulaeman pada 13 Juni 2020).

Dedi Mulyadi merefleksikan dirinya agar bisa semirip mungkin dengan khalayak untuk kemudian disukai demi menjaga elektabilitasnya dan politik yang berdasarkan kepentingan keluarganya itu bagian dari strategi dalam rangka mempertahankan kekuasaannya. Tak pelak ini berimbas

⁷ *Auliya* adalah kata yang tercantum di beberapa ayat suci *al-Qur'an*. Ada perbedaan *tafsir* terkait makna dari *auliya*. Ada yang memaknainya **pemimpin, teman setia, orang kepercayaan, dan pelindung**, dan itu sah-sah saja. Namun, peneliti berpendapat bahwa *auliya* memiliki arti pemimpin. Apalagi disesuaikan dengan maksud dari informan.

pada masyarakat yang mengafirmasi kesundaan Dedi Mulyadi yang dijadikan *role model*.

“Sentuhan-sentuhan Sunda yang biasa beliau (baca: Dedi Mulyadi) lakukan ke masyarakat itu menyentuh mengena di hati, itu yang jadi persoalan. Kenapa masyarakat Purwakarta masih tetap memilih dinasti Dedi Mulyadi? Karena mereka berpikir *ieu yeuh nu merjuangkeun sunda teh* (baca: ini nih yang memperjuangkan Sunda), meskipun kalau kita mau perdebatkan secara jujur kita wajib bertanya dong apakah Sunda yang sebenarnya ini adalah *jiga kitu* (baca: seperti itu)?” (Wawancara dengan Raden Deden Ipan Sulaeman pada 13 Juni 2020).

Raden Deden Ipan Sulaeman berpendapat terkait relasi kesundaan dan kekuasaan yang Dedi Mulyadi bawa merupakan kepentingan jangka panjang baginya untuk di masa depan menjadi pemimpin. Maka perlu bagi Dedi Mulyadi menancapkan kekuasaannya di Purwakarta sebagai bagian dari pohon kekuasaannya. Deden pada satu sisi dia mendukung, akan tetapi di sisi yang lain dia mengungkapkan salah satu kekecawaannya juga kepada Dedi Mulyadi.

“Dedi Mulyadi tidak akan berhenti sebelum dia jadi Presiden, dijadikan istri dan anaknya proses ke sana, tapi sebagai *urang Sunda* (baca: orang Sunda) saya bangga, *kudu aya nu kitu urang*

Sunda teh (baca: harus ada yang seperti itu orang sunda) terlepas kepentingannya seperti apa. (Wawancara dengan Raden Deden Ipan Sulaeman pada 13 Juni 2020).

Atas dasar itu, peneliti meminta pandangan dari salah satu akademisi yang ahli dalam kebudayaan Sunda terkait peran Dedi Mulyadi dalam dinamika politik di Kabupaten Purwakarta. Peneliti tidak mencantumkan identitas akademisi tersebut disebabkan permintaan dari yang bersangkutan. Peneliti menuliskannya secara alias, yaitu AB. AB berpandangan bahwa praktik dinasti politik yang diperankan oleh aktor politik yang memiliki latar belakang kesundaan memunculkan pemaknaan yang berkaitan dengan orientasi politik Dedi Mulyadi yang menjadikan istri dan anaknya sebagai pijakan dalam rangka memperkuat gerak langkahnya dalam berpolitik.

“Basis sosial di Purwakarta harus dipertahankan sebagai pegangan minimal yaitu dengan cara istri dan anaknya berada pada posisi-posisi yang kuat secara politik baik itu di partai politik maupun di pemerintahan, itu karena dia perlu Purwakarta sebagai pegangan buat dia, kalau saya sih lihatnya pasti arahnya Jabar atau RI 1.” (Wawancara dengan AB pada 27 Desember 2019).

Di sisi yang lain, AB mengapresiasi kegigihan Dedi Mulyadi dalam melakukan gerakan politik sampai merambah hampir ke seluruh pelosok di Jawa Barat. AB melihat secara umum

respon masyarakat sendiri terhadap Dedi Mulyadi cukup baik, apalagi Dedi selalu membawa identitas kesundaan dalam setiap kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat. Masyarakat melihat sosok Dedi Mulyadi sebagai pejabat publik yang tidak sungkan untuk menggunakan segala atribut pemerintahan dengan seni budaya Sunda.

“Dia usahanya bagus konsisten dengan usahanya dari sisi itu saya salut, ada orang Sunda punya *keukeuh kahayang* (baca: teguh keinginan) seperti itu dan dia melakukan itu.”
(Wawancara dengan AB pada 27 pada Desember 2019).

Pandangan mengenai kesundaan yang dikemukakan oleh AB terhadap Dedi Mulyadi tidak berlebihan, karena Dedi Mulyadi sebagai sosok politisi yang memang berusaha membuat sebuah *legacy* khusus terhadap budaya Sunda, apalagi ketika menjabat sebagai bupati Purwakarta. Mulai dari kebijakan pendidikan, pariwisata hingga infrastruktur dicitrakan sesuai dengan identitas budaya Sunda.

Hal senada dituturkan oleh Asep Gunawan dalam memandang Dedi Mulyadi kaitannya dengan budaya Sunda. Di satu sisi Asep mengkritik tentang kebudayaan Sunda yang dijadikan identitas politik Dedi Mulyadi, namun di sisi yang lain Asep melihat adanya kegigihan Dedi untuk terus menggunakan budaya Sunda sebagai alat politiknya.

“Ada manipulasi dalam konsepsi kesundaan, namun yang patut kita hargai adanya konsistensi. Konsep kesundaan dia gunakan

selama itu menguntungkan.”
(Wawancara dengan Asep Gunawan pada 18 April 2020).

Raden Deden sebagai orang Purwakarta turut mendukung atas upaya yang dilakukan Dedi Mulyadi untuk menjadi pemimpin Indonesia di masa depan, namun demikian, jika dalam sisi Sunda, dia tidak menginginkan Dedi Mulyadi menjadi seorang sosok besar. Karena dia tidak ingin ada sebuah hegemoni kekuasaan di alam demokrasi seperti sekarang ini.

“Kalau dari unsur politik, saya sebagai orang Purwakarta *ngadukung penuh ka manehna, kudu* (baca: mendukung penuh ke dia, harus) jadi presiden dong. Tetapi sebagai orang Sunda *saya teu ridho Dedi Mulyadi jadi jelema gede* (baca: saya tidak rela Dedi Mulyadi jadi manusia besar). Karena itu tidak bagus untuk Purwakarta.”
(Wawancara dengan Raden Ipan Sulaeman pada 13 Juni 2020).

Refleksi dirinya merupakan usaha mengadaptasikan keseluruhan hidupnya agar semakin mirip dengan audiensnya dalam arti masyarakat Kabupaten Purwakarta yang mayoritas beretnis Sunda. Dedi memasarkan dirinya sebagai pemimpin yang berasal dari Sunda, dia ingin dipotret sebagai sosok representasi dari masyarakat sunda. Alhasil, respon sebagian besar masyarakat besar masyarakat Kabupaten Purwakarta terhadap dirinya cukup baik. Terbukti dari dia terpilih sebagai bupati dua periode berturut-turut dengan menggunakan atribut kesundaan sebagai citra dirinya sebagai

pemimpin yang pantas untuk dipilih, hal ini pun berimbas pada pelanggaran kekuasaannya -istri dan anaknya- yang dianggap sebagai sebuah pelanjutan kepemimpinan Dedi Mulyadi.

3.3. Identifikasi Kabupaten Purwakarta Sebagai Dinasti Politik

Sebagaimana lima kriteria praktik dinasti politik yang menjadi pijakan peneliti sebagaimana ditulis di awal, yaitu: *Pertama*, tidak adanya jeda berkuasa dalam kontestasi politik (memiliki efek politik dari petahana). *Kedua*, adanya kapitalisasi status sebagai keluarga penguasa (memanfaatkan momentum untuk bisa masuk ke wilayah politik). *Ketiga*, nominasi pencalonan kepala daerah dan jabatan politik lain tidak dilakukan dengan demokratis (orang yang dicalonkan tidak diuji kemampuan dan pengalamannya). *Kempat*, melanjutkan tradisi kekuasaan (melindungi dan menikmati sesuatu yang dimiliki sebelumnya oleh keluarganya). Dan *kelima*, adanya kolaborasi antara penguasa untuk menggabungkan kekuatan politisi.

Dari kelima kriteria dinasti politik di atas, bisa diidentifikasi bahwa, *pertama*, indikasi terbentuknya sebuah dinasti politik di Kabupaten Purwakarta, ketika pada hasil pilkada serentak tahun 2018 dipimpin oleh Anne Ratna Mustika seorang bupati yang merupakan istri dari bupati sebelumnya yaitu Dedi Mulyadi. Mata rantai kekuasaan yang sengaja dirancang oleh Dedi Mulyadi meniscayakan kekuasaan di Purwakarta tetap masih dalam kontrol dari dia. Terbukti dari berbagai acara kerakyatan menonjolkan sosok Dedi Mulyadi, padahal dia bukan lagi sebagai bupati.

Kedua, imbas dari relasi keluarga tersebut membuat Anne Ratna Mustika mendapatkan “gelembungan” status sosial tinggi sebelum benar-benar terjun menjadi kandidat bupati. Kedekatan dengan bupati sebelumnya dengan sering ikut terlibat di ruang-ruang publik, membuat sebagian masyarakat merasa bahwa istrinya tepat untuk melanjutkan kepemimpinan sang suami. Walaupun, secara realitas kapabilitas, Anne Ratna Mustika jauh dibandingkan dengan Dedi Mulyadi. Adanya disparitas Anne dengan Dedi Mulyadi dalam memimpin, terjun ke masyarakat, mengelola konflik, bahkan berbicara di depan umum itu memang diakui atau tidak adalah fakta. Kendati demikian, status sebagai istri sang penguasa Anne mendapatkan keuntungan persepsi yang begitu baik di masyarakat dibandingkan kandidat bupati lain.

Ketiga, tidak adanya proses nominasi yang memiliki standar jelas, transparan, dan juga demokratis dalam penetapan Anne Ratna Mustika sebagai kandidat bupati dari partai Golkar serta Maula sebagai ketua partai Golkar Kabupaten Purwakarta, yang bahkan belum genap setahun masuk di jajaran pengurus di Purwakarta. Artinya jenjang kaderisasi di partai politik yang tidak dilalui dengan secara “tertib”, mengabaikan kompetensi serta pengalaman dua sosok nama tersebut.

Keempat, dengan bercokolnya Anne Ratna Mustika dan Maula sebagai penguasa di pemerintahan Kabupaten Purwakarta dan partai penguasa, membuat kepentingan Dedi Mulyadi sebagai aktor utama tetap terjaga dan bahkan dikembangkan oleh penerusnya. Program-program -baik secara suprastruktur atau infrastruktur- yang pernah diterapkan di Kabupaten Purwakarta seperti tradisi kesundaan

yang diterapkan di sekolah-sekolah, patung-patung tokoh Sunda, hingga kebijakan terkait pariwisata tidak “diganggu” oleh kelompok yang tidak satu *frekuensi* dengan Dedi Mulyadi.

Kemudian *kelima*, pengkondisian struktur yang dijadikan basis kekuatan politik sang aktor. Instrumen kekuatan politik tersebut diantaranya, partai Golkar, birokrasi, dan sebagian budayawan Sunda. Secara eksplisit mereka diposisikan sebagai pihak yang mendukung dinasti politik di Kabupaten Purwakarta. Penunjang kekuatan aktor politik tersebut menjadi bagian dari dinasti politik dalam memperkuat basis kekuasaannya.

Kaka Suminta menilai poin utama dari terbentuknya dinasti politik yang terjadi di Kabupaten Purwakarta merupakan relasi nyaris sempurna antara aktor politik yang melakukan pelemahan terhadap struktur yang berpengaruh pada pelanggaran kekuasaan.

“Birokrat memperpanjang dirinya baik di eksekutif atau legislatif itu mempunyai perpanjangan tangan dalam bentuk ormas-ormas sehingga hampir tidak ada sebenarnya organisasi masa, yang ada itu sekelompok organisasi yang menjadi perpanjangan tangan politik dari eksekutif. Sehingga birokrasi, partai politik, ormas itu adalah sebenarnya merupakan perpanjangan tangan dari eksekutif. Jadi ada subordinasi terhadap partai politik baik yang dipimpinnya maupun partai politik oposisi lainnya. Kemudian ada subordinasi

di birokrasi dan subordinasi di masyarakat sipil.”

(Wawancara dengan Kaka Suminta pada 22 Mei 2020).

Dari penelusuran terkait peran aktor politik dalam membentuk dinasti politik di Kabupaten Purwakarta, peneliti menemukan bahwa peran itu terletak pada kekuasaan sang aktor yang sadar akan kemampuannya yang kemudian mengimplementasikan strategi untuk mempertahankan kekuasaannya. Dengan melibatkan berbagai struktur yang mendukung terbentuknya politik dinasti ini, jelas bisa dikatakan bahwa Kabupaten Purwakarta adalah daerah yang jelas masuk kategori dinasti politik.

Sebagaimana menurut Caroline Paskarina, kadangkala hadirnya aktor politik yang bercokol di dalam struktur kekuasaan pemerintahan di daerah tidak berguna dalam menciptakan iklim demokrasi yang sesungguhnya. “Aktor-aktor dominan dipandang tidak banyak melakukan upaya-upaya signifikan dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi.” (Paskarina, 2015: 59). Hal tersebut ditambah lemahnya kekuatan dari politik aktor-aktor politik alternatif yang diharapkan mampu mengimbangi kekosongan tersebut.

Realitas demikian merupakan upaya sang aktor dalam membangun “pohon kekuasaan” yang hanya dihuni oleh multiplikasi aktor, yaitu aktornya itu-itu saja. Menjadikan istrinya sebagai bupati dan anaknya sebagai ketua partai politik di daerah hingga posisi strategis lain dimiliki oleh keluarga besarnya. Ini sudah melenceng dari nilai-nilai demokrasi, yang intinya adalah memberikan ruang, kesempatan, serta peluang yang besar kepada warga negara yang memiliki atau memenuhi kriteria untuk menjadi pemimpin.

Menjadi *musykil* peluang masyarakat luas ketika harus dikuasai bahkan dibolehkan payung hukum yang tidak menghentikan itu sama sekali.

Dari penjabaran atas penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui studi lapangan yang dilandasi dengan kerangka teoritis terkait posisi aktor dalam sudut pandang Colin Hay, maka aktor dalam membentuk sebuah dinasti politik di Kabupaten Purwakarta sudah cukup membuktikan bahwa dia memiliki peran yang signifikan dengan *knowledge* sebagai basisnya. Hal itu didasarkan pada *conscious* (kesadaran) dirinya yang merasa layak menjadi seorang pemimpin, kemudian dia melakukan *reflexive* dengan melakukan *positioning* agar bisa semirip mungkin dengan masyarakat melalui atribut kesundaan, dan yang tidak kalah pentingnya sang aktor merancang sebuah strategi agar kekuasaannya tetap di genggam dengan cara menjadikan istri serta anaknya masing-masing sebagai bupati dan ketua partai politik di aras lokal. Semua itu terbalut dengan *hidden power* (kekuasaan yang tersembunyi), yang dalam artian peran aktor membangun dinasti dilakukan dengan tanpa diketahui secara terbuka oleh khalayak, karena dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan *status quo* sang aktor.

I.V. Kesimpulan

Dari studi ini dapat disimpulkan bahwa dinasti politik yang ada di Kabupaten Purwakarta dibentuk oleh Dedi Mulyadi sebagai aktor politik yang memiliki peran besar. Dengan *political skill* nya yaitu *conscious, reflexive and strategic*, yang berbasis *knowledge*, aktor layak disebut sebagai otak serangan dari bangunan dinasti. Pengkondisian partai politik, birokrasi,

dan budayawan Sunda dikemas dengan kekuasaan yang tidak terendus (tersembunyi) oleh mayoritas masyarakat Purwakarta. Aktor itu sendiri memiliki kepentingan jangka panjang di masa depan yang menginginkan kekuasaan di tingkat yang lebih tinggi.

Berbeda dengan dinasti politik yang jamak terjadi di daerah lain, Purwakarta memiliki kekhasan dari hasrat sang aktor yang mendasarkan pada kekuasaan Sunda yang harus bisa memimpin di tingkat Nasional. Dengan menjabat istri dan anaknya sebagai pucuk pimpinan di pemerintahan dan partai politik, maka hal tersebut dijadikan sebagai basis kekuatan yang menopang kekuasaannya yang lebih besar. Kekuasaan yang dibentuk tidak terlihat tersebut sangat beriringan dengan kepentingan sang aktor, yang berimbang pada terpusatnya kekuasaan dengan mengesampingkan masyarakat luas dalam mengisi pos-pos kekuasaan.

Pohon kekuasaan yang dibentuk menggambarkan Dedi Mulyadi sebagai akar sekaligus pucuk dari bagian tersebut. Peranan yang signifikan dari sang aktor membuat Anne Ratna Mustika dan Maula bisa saling berkolaborasi dalam menjalankan instrumen kekuasaan yang dipimpin oleh Dedi Mulyadi sebagai komposer. Maka bisa dikatakan bahwa, telah terjadi *osteoporosis* demokrasi di Kabupaten Purwakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muhammad. (2015). *Political: Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik dan Welfare State*. Yogyakarta: Buku Litera.

- Aziz, Abdul (2019) *Politik Indonesia Kini: Potret Budaya Politik Hingga Dinamika Pilkada*. Malang: Intelegensia Intrans Publishing.
- Bathoro, Alim. (2011). "Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi." *Jurnal FISIP Umrah*. Vol 2. No 2.
- Creswell, John W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Penerjemah: Ahmad Lintang Lazuardi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djati, Wasito Raharjo. (2013). "Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal." *Jurnal Sosiologi Masyarakat*. Vol 18. No 2.
- Gaventa, John. (2009). "Understanding The Powercube and Related Concepts."
- Halim, Abd. (2014). *Politik Lokal: Pola, Aktor, & Dramatikalnya*. Yogyakarta: LP2B.
- Hay, Colin. (2001). "What Place for Ideas in the Structure-Agency Debate? Globalisation as a Process Without a Subject." Birmingham: University of Birmingham.
- Muksin, Dafrin. Titin Purwaningsih dan Achmad Nurmandi. (2019). "Praktik Dinasti Politik Di Aras Lokal Pasca Reformasi: Studi Kasus Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus Pada Pilkada Provinsi Maluku Utara." *Jurnal Wacana Politik*. Vol. 4 No. 2.
- Paskarina, Caroline. (2015). *Patronase vs Populisme: Strategi Mengelola Kesejahteraan dalam Politik Perkotaan di Bandung*. Dalam Caroline Paskarina, Maraitul Asiah, dan Otto Gusti (Ed), *Berebut Kontrol atas Kesejahteraan: Kasus-kasus Politisasi Demokrasi di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: PolGov
- Rahmat, Hollyson. (2015). *Pilkada: Penuh Euforia, Miskin Makna*. Jakarta: Penerbit Lestari.
- Susanti, Martien Herna. (2017). "Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia". *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 1, No. 2.

Wawancara

Sarif Hidayat
AHB Maula Akbar
Raden Deden Ipan Sulaeman
Asep Gunawan
Mantan Birokrat
AB
Kaka Suminta
Zaenal Abidin